

Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dan Kinerja Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar

Yuni Tirtasari Siallagan

Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : yunisiallagan999@gmail.com

Kusmilawaty Kusmilawaty

Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : kusmilawaty@uinsu.ac.id

Korespondensi : yunisiallagan999@gmail.com

Abstrack .This study aims to analyze the efficiency of budget realization and financial performance at the personnel and Human Resource Development Agency of Pematang Siantar. The data used in this study is secondary data obtained from the BKPSDM budget realization report data analysis the data used is quantitative analysis by calculating the efficiency ratio and growth ratio of budget realization in 2020-2022. The results of the study show that the performance of the budget realization Office of the personnel and Human Resources Development Agency of Pematang Siantar from 2020-2022 can be seen from the analysis of the spending efficiency ratio with an average of 87.30% which reflects a fairly efficient, where the realization of spending is smaller than the budget. Then the analysis of spending variants Bkpsdm Pematang Siantar as a whole for 3 years showed good financial performance. Where from 2020-2022 Bkpsdm Pematang Siantar uses less than the budgeted amount.

Keywords: Realization, Budget, Financial Performance

Abstrak .Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi realisasi anggaran belanja dan kinerja keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data Laporan Realisasi Anggaran Belanja BKPSDM . Analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan cara menghitung rasio efisiensi dan analisis varian belanja realisasi anggaran belanja tahun 2020-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja realisasi anggaran kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar dari tahun 2020-2022 dapat di lihat dari Analisis Rasio Efisiensi Belanja dengan rata-rata sebesar 87,30% dimana mencerminkan belanja yang cukup efisien, dimana realisasi belanja lebih kecil dibanding dengan Anggaran Belanja. Kemudian Analisis Varian Belanja BKPSDM Pematang Siantar secara keseluruhan selama 3 tahun menunjukkan kinerja keuangan baik. Dimana dari tahun 2020-2022 BKPSDM Pematang Siantar menggunakan kurang dari jumlah yang dianggarkan.

Kata Kunci: Realisasi, Anggaran Belanja, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Peraturan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Salah satu komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi tersebut adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh suatu entitas akan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan. Peraturan tersebut telah ditetapkan standar yang mengatur tentang bagaimana penyajian laporan realisasi anggaran yang semestinya. (Hasanah 2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 telah menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang terdiri dari gambaran mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasi anggaran selama tahun tahun atau periode tertentu. Menurut Mahmudi (2018) Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen yang sangat penting untuk dianalisis, untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisiensi dan efektif (*value for money*). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bahan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam sidang DPRD untuk disetujui sebagai APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Azas ini mengharuskan pemerintah daerah merencanakan kegiatan daerah yang dibutuhkan masing-masing dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan. Penyusunan APBD didasarkan kepada rencana kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan masyarakat untuk mencapai cita-cita negara. APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Secara sederhana, anggaran pemerintah adalah sejumlah sumber daya berupa uang yang direncanakan akan digunakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya di masa depan. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Bisa dikatakan, anggaran merupakan cerminan kegiatan pemerintah. Seperti yang telah diketahui bersama, secara umum anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja. Untuk bisa mengukur tingkat realisasi anggaran, diperlukan data realisasi dari anggaran tersebut. Perlu diukur pula tingkat pencapaian tujuan dari anggaran dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dan belanja-belanja yang dicantumkan dalam anggaran dapat mencapai tujuan dari anggaran itu sendiri.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar mempunyai dan menetapkan target capaian kinerja setiap anggaran belanja, dalam program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran belanja,

memeriksa penurunan dan kenaikan realisasi anggaran, dan memperjelas efisiensi pengguna anggaran belanja serta perkembangan pertumbuhan belanja terhadap kinerja keuangan BKPSDM. Laporan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan merupakan suatu alat dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2020 realisasi anggaran kantor BKPSDM sebesar Rp.5.264.017.331,00 dengan kriteria kurang efisien (94,8%) hal ini menimbulkan pertanyaan apakah realisasi anggaran belanja daerah kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar sudah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang penting untuk mengkaji laporan realisasi anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar tahun 2020-2022 untuk mengetahui seberapa efisien penyerapannya. Maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dan Kinerja Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar"**

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah adalah bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintah merupakan akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Sujarweni, 2016 : 18). Akuntansi pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Hasanah dan Fauzi, 2017:1). Menurut Indra Bastian (2010:3), "Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

Anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan segala aktivitas

dan kegiatan organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik (Wiratna, 2015:28). Anggaran berisi rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan lainnya untuk suatu periode tertentu (Garrison dan Noreen, 2013:402). Ikhsan (2009:173) berpendapat tentang anggaran, bahwa : “Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melaksanakan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan. Anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihan-pilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari”.

Anggaran bagi sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting karena anggaran adalah alat bagi manajemen dalam mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Menurut Mardiasmo (2018:139) anggaran daerah berfungsi sebagai yaitu : Anggaran sebagai alat Perencanaan, Anggaran sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*), Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, Anggaran sebagai alat politik, Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, Anggaran sebagai alat motivasi, Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Selain itu anggaran juga memiliki manfaat yaitu (1) semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama; (2) dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kelemahan karyawan; (3) dapat memotivasi karyawan; (4) menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran mejadi jelas; dan (5) menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. (Nafarin 2017:19).

Belanja

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Belanja :“Merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Halim (2012) belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Sedangkan menurut Sasongko dan Parulian (2015:2),berpendapat bahwa : “Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan”.

Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No.21 tahun 2011, belanja dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- 1) Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.
- 2) Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Menurut Arif (2009:36) Laporan realisasi anggaran menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan serta perbandingan antara realisasi tersebut dan anggaran dalam satu periode pelaporan. Dengan demikian komponen dari laporan realisasi anggaran meliputi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, masing-masing komponen tersebut yaitu :

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tujuan laporan realisasi anggaran adalah memutuskan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

Kinerja Keuangan

Definisi kinerja menurut Pasolong (2010:176), menyebutkan bahwa kinerja merupakan: “Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. Menurut Veithzal Rivai (2015:14), yaitu: “Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”

Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018:166) menyatakan bahwa efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dan serendah-rendahnya (*spending well*).

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar. Adapun waktu penelitian berlangsung selama 1 (satu) bulan dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka seperti data laporan realisasi belanja tahun 2020-2022.
- b. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka yang berupa gambaran umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar.

3. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dengan teknik ini fenomena yang akan diteliti diperoleh dari beberapa dokumen yang ada, peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, buku, dan lain sebagainya. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti total Anggaran, Laporan realisasi belanja.

2. Observasi

Meliputi semua peristiwa yang langsung dialami dalam pelaksanaan penelitian baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, metode analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan Realisasi Anggaran dengan menggunakan Rasio Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisien belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2019). Efisien belanja dapat diukur dengan Rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} : \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel : 1
Kriteria Tingkat Efisien Belanja Daerah Secara Umum

Kategori	Predikat
Sangat efisien	<60%
Efisien	60%-80%
Cukup efisien	80%-90%
Kurang efisien	90%-100%
Tidak efisien	>100%

Sumber: Mahmudi (2019)

2. Analisis Varian Belanja

Menurut Mahmudi (2007: 143) dalam hal belanja terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. Analisis varian merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

$$\text{Varian Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$

Kriteria Tingkat Varian Belanja

Kriteria Varian Belanja	Ukuran
Baik	Realisasi Belanja \leq Anggaran Belanja
Kurang Baik	Realisasi Belanja $>$ Anggaran Belanja

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Laporan Realisasi Belanja Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar. T.A 2020-2022.

Belanja Operasi dan Belanja Modal merupakan pos-pos penyusun belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut ini merupakan tabel Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 sampai 2022.

Tabel 2.
Realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasi Tahun 2020-2022.

Tahun	Belanja Operasi		Belanja Modal	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	5.271.835.754,00	5.002.498.331,00	282.383.332,00	261.519.000,00
2021	6.984.417.157,00	5.888.964.554,00	339.630.300,00	335.034.000,00
2022	7.870.129.057,00	6.590.520.185,00	260.336.300,00	259.396.200,00

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa jumlah Realisasi Belanja Operasi dari Tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami Fluktuasi, dimana pada tahun 2020 sebesar Rp5.002.498.331,00 sedangkan di tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu Rp5.888.964.554,00 Dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu Rp6.590.520.185,00. Sedangkan Belanja Modal dari tahun 2020-2022 juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 sebesar Rp261.519.000,00. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp335.034.000,00 akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 259.396.200,00

Berikut ini merupakan tabel Anggaran dan realisasi Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 sampai 2022.

Tabel 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja T.A. 2020-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	5.554.219.086,00	5.264.017.331,00
2021	7.324.047.457,00	6.223.998.554,00
2022	8.130.465.357,00	6.849.916.385,00

Sumber : Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukan bahwa jumlah realisasi belanja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar T.A 2020-2022 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 yaitu Rp5.264.017.331,00 sedangkan di tahun 2021 yaitu sebesar Rp6.223.998.554,00 dan di tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar Rp6.849.916.385,00

Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Berikut ini adalah hasil penelitian efisiensi belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar dari tahun 2020 sampai tahun 2022 :

$$\text{Rasio Efisiensi} : \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 5.264.017.331,00}{\text{Rp } 5.554.219.086,00} \times 100\% = 94,8\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp } 6.223.998.554,00}{\text{Rp } 7.324.047.457,00} \times 100\% = 84,9\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Rp } 6.849.916.385,00}{\text{Rp } 8.130.465.357,00} \times 100\% = 84,2\%$$

Tabel. 4

Rasio Efisiensi Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pematang Siantar 2020-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %	Kriteria
2020	5.554.219.086,00	5.264.017.331,00	94,8%	Kurang Efisien
2021	7.324.047.457,00	6.223.998.554,00	84,9%	Cukup Efisien
2022	8.130.465.357,00	6.849.916.385,00	84,2%	Cukup Efisien
Rata-rata			87,30%	Cukup Efisien

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,2023

Tabel di atas menunjukkan tingkat efisiensi anggaran belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Tahun 2020- 2022. Pada tahun 2020, tingkat efisiensi sebesar 94.8% (kurang efisien). Tahun 2020, tingkat efisiensi sebesar 84,9% (Cukup Efisien). Dan tahun 2022 tingkat efisiensi sebesar 84,2% (Cukup Efisien).

Dari keseluruhan rata-rata belanja daerah dapat dikategorikan cukup efisien, hal ini berarti kinerja BKPSDM Pematang Siantar pada tahun 2020-2022 cukup mampu dalam membelanjakan anggarannya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Analisis Varian Belanja

Analisis varian belanja adalah analisis yang dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan.

Tabel. 5

Analisis Varian Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih (Rp)	Kriteria Varian
2020	5.554.219.086,00	5.264.017.331,00	290.201.755,00	Baik
2021	7.324.047.457,00	6.223.998.554,00	1.100.048.903,00	Baik
2022	8.130.465.357,00	6.849.916.385,00	1.280.548.972,00	Baik

Sumber: BKPSDM Pematang Siantar, 2023

Kinerja belanja pemerintah daerah akan dinilai sudah baik, jika realisasi belanja tidak melebihi jumlah uang dianggarkan (Mahmudi, 2007: 143). Perhitungan dari analisis varian belanja daerah kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pematang Siantar berdasarkan laporan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga 2022 menunjukkan kinerja yang baik.

2. Pembahasan

a. Analisis Efisiensi Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar tahun 2020-2022

Laporan keuangan BKPSDM Pematang Siantar menunjukkan bahwa total anggaran Belanja Daerah mengalami kenaikan dari tahun 2020-2022. Tahun 2020 total anggaran Belanja Daerah Rp. 5.554.219.086,00 Pada tahun 2021 mengalami kenaikan total anggaran belanja menjadi Rp. 7.324.047.457,00. Dan pada tahun 2022 total anggaran Belanja Daerah mengalami kenaikan menjadi Rp 8.130.465.357,00.

Berdasarkan hasil penelitian diatas rasio efisiensi Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar tahun anggaran 2020 sampai 2022 menunjukkan hasil yang cukup efisien. Dimana Rasio efisiensi belanja pada tahun Anggaran 2020 rasio efisiensi belanja sebesar 94,8%, hal ini mencerminkan belanja yang kurang efisien karena persentase efisiensi hampir mendekati 100%, artinya realisasi belanja sebesar Rp5.264.017.331,00 sudah mendekati anggaran yang ada. Pada Tahun 2021 rasio efisiensi belanja yaitu 84,9% dengan realisasi belanja sebesar Rp6.223.998.554,00. Hal ini mencerminkan belanja yang cukup efisien karena realisasi belanja lebih sedikit dibanding dengan anggaran yang ada. Pada tahun 2022 rasio efisiensi belanja menjadi 84,2%.

Perhitungan rasio efisiensi belanja dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 yaitu sebesar 94,8%, 84,9%, 84,2%, masih dalam predikat kurang dari 100%, artinya realisasi belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar dalam kategori cukup efisien. Oleh karena rata-rata tiap tahun belanja yang direalisasikan masih lebih rendah dari anggaran yang ada. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar telah melakukan penghematan dari total anggaran yang telah dianggarkan.

b. Analisis Varian Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar tahun 2020-2022

Berdasarkan Tabel 5. hasil perhitungan varian belanja daerah kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar tahun 2020-2022 menunjukkan kinerja yang baik dimana terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi bersaldo positif yaitu pada tahun anggaran 2020 dengan kriteria yang

menunjukkan realisasi belanja lebih kecil dari anggaran belanja sebesar Rp290.201.755,00, tahun anggaran 2021 dengan kriteria yang menunjukkan realisasi belanja lebih kecil dari anggaran belanja sebesar Rp1.100.048.903,00, dan tahun anggaran 2022 dengan kriteria yang menunjukkan realisasi belanja lebih kecil dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.280.548.972,00,.

Melalui analisis varian belanja dapat di ketahui seberapa besar selisih antara anggaran belanja terhadap realisasi belanja. Dengan adanya varian belanja dimasukkan untuk mendorong kinerja keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar dalam mencapai anggaran belanja daerah yang tinggi. Dilihat dari data tahun 2020-2022 bahwa BKPSDM Pematang Siantar menunjukkan hasil bahwa jumlah varian belanja mampu merealisasikan belanja karena tidak melebihi yang dianggarkan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Berdasarkan Analisis Rasio Efisiensi Belanja bahwa keseluruhan rata-rata sebesar 87,30% dimana mencerminkan belanja yang cukup efisien artinya Tingkat efisiensi belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar menunjukkan kinerja yg cukup baik, dimana realisasi belanja lebih kecil dibanding dengan Anggaran Belanja.
2. Berdasarkan Analisis Varian Belanja BKPSDM Pematang Siantar secara keseluruhan selama 3 tahun menunjukkan kinerja keuangan dinilai baik. Dimana tahun 2020-2022 BKPSDM Pematang Siantar menggunakan kurang dari jumlah yang dianggarkan. Namun, dari segi nominal jumlah realisasi belanja mengalami kenaikan, akan tetapi jumlah tersebut masih relatif kecil dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja keuangan masih dinilai baik dan dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan.

2. Saran

1. Untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja daerah. Dengan kinerja yang baik maka efisiensi belanja juga akan semakin baik. Terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran agar optimalisasi yang diinginkan segera terlaksana sesuai visi dan misi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pematang Siantar. Dalam hal efisiensi belanja daerah agar lebih

mantap dalam meningkatkan pertumbuhan optimal anggaran belanja dengan kriteria baik dari tahun sekarang sampai seterusnya.

2. Kiranya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian tentang Belanja Daerah agar dapat dibandingkan dengan data-data terbaru mengenai Realisasi Anggaran Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halkadri Fitra., & Zahro ilmi Efendi . (2020). Analisi Laporan Realisasi Anggaran untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Menara Ilmu*. Volume XIV Nomor 01.
- Hasanah. N dan Vidiyastutik E.D (2018) Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo, *Jurnal ECOBUSS* Vol. 6 No. 2 ISSN 2337 – 9340
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo, (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta
- Maridiasmo, (2005). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: andi.
- Nur Hasanah, Elok Dwi Vidiyastutik. (2018). "ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN DALAM BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROBOLINGGO." *JURNAL ECOBUSS* Vol. 6 Nomor 2 26-35.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Undang–Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Sunarty Misa, Jantje Tinangon, Stanley Walandouw. (2022). "Evaluasi Efektifitas Realisasi Belanja Daerah Pada Badaan Kepegawaian Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* Vol. 5 No. 2 1003 - 1010.
- Tia setiani., & Rika Nurul Medila. (2019). Analisi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi (2019). *Jurnal Akuntansi*. Volume XII Nomor 02
- YUSNI, ROSMA NDIK. 2020. "ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA MASA PANDEMI COVID 19 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANGGAI." *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)* Vol. 7, No 1, 71-84.